



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUTARNO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **96509**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.985.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/140 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000
3. Tanah Seluas 860 m2 di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 2170 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 905.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/200 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000
6. Tanah Seluas 17895 m2 di KAB / KOTA OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 744.600.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX 2 DP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
4. MOTOR, YAMAHA LEXY B3F-F A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.100.000



5. MOTOR, HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T Tahun 2023, HASIL
SENDIRI Rp. 18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	319.440.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	193.895.427
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.242.935.427

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.242.935.427

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.